



TATA LAKSANA E-GOVERNMENT DESA DI DESA TANIMULYA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Veronica Fauziah¹⁾

¹⁾ Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Tanimulya, Kabupaten Bandung Barat, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami permasalahan sosial yang bersifat dinamis terkait dengan implementasi SID. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum terlaksana dengan baik, ditandai dengan tidak adanya website resmi desa yang menyediakan sistem informasi desa secara online. Hal ini menyebabkan kebutuhan masyarakat akan akses informasi belum terpenuhi dengan optimal. Meskipun pemerintah desa telah mencoba mengadopsi konsep *e-government* melalui SID berbasis web, pengelolaan konten yang tidak memadai serta keterbatasan akses jaringan internet menjadi kendala utama dalam pelaksanaan sistem ini. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah Kabupaten Bandung mengembangkan peraturan tambahan yang mengatur SID serta pemerintah desa segera memulai implementasi SID berbasis internet yang sesuai dengan ketentuan pasal 86 UU Desa. Selain itu, kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun sistem informasi desa yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Tanimulya.

Kata Kunci: Sistem Informasi Desa, e-Government, transparansi, akuntabilitas, Desa Tanimulya.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Village Information System (Sistem Informasi Desa - SID) in Tanimulya Village, West Bandung Regency, which is expected to enhance transparency, accountability, and efficiency in public services. The research employs a qualitative approach with descriptive methods to understand the dynamic social issues related to SID implementation. The findings reveal that the implementation of Article 86 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages

has not been fully realized, as indicated by the absence of an official village website providing an online village information system. This inadequacy results in the community's needs for information access not being optimally fulfilled. Although the village government has attempted to adopt the e-government concept through a web-based SID, inadequate content management and limited internet access are major obstacles to its implementation. Based on these findings, it is recommended that the Bandung Regency government develop additional regulations governing SID and that the village government promptly initiate an internet-based SID implementation in line with the provisions of Article 86 of the Village Law. Furthermore, collaboration between the village government and the community in developing an effective village information system is essential for improving the quality of life of the Tanimulya Village community.

Keywords: *Village Information System, e-Government, transparency, accountability, Tanimulya Village.*

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan dalam mempermudah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal surat-menyurat yang kini dapat dilakukan melalui media sosial. Selain itu, teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan mudah ketika dibutuhkan. Salah satu implementasi yang menarik adalah penggunaan sistem informasi desa oleh Desa Tanimulya di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Meskipun desa ini telah memiliki situs berbasis WordPress yang memberikan informasi dasar mengenai Desa Tanimulya, sistem informasi desa yang ada masih belum memenuhi harapan dalam hal transparansi dan akuntabilitas informasi publik.

Desa Tanimulya telah mencoba mengadopsi konsep e-government melalui pengembangan sistem informasi desa berbasis WordPress. E-government sendiri adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Namun, penerapan e-government di Desa Tanimulya melalui sistem informasi desa ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal pengelolaan dan penyampaian informasi yang up-to-date dan relevan kepada

masyarakat. Sistem Informasi Desa (SID) seharusnya berfungsi sebagai alat yang mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan data desa serta memfasilitasi akses informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Namun, di Desa Tanimulya, meskipun sudah ada jaringan yang memungkinkan akses oleh masyarakat, situs WordPress yang digunakan tidak secara optimal memberikan informasi yang dibutuhkan. Misalnya, dalam sub-menu terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), informasi yang seharusnya tersedia ternyata tidak dapat diakses.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Desa Tanimulya telah berusaha untuk mengimplementasikan sistem informasi desa sesuai dengan definisi e-government, realitas di lapangan masih jauh dari ideal. Sistem informasi desa yang ada hanya menyajikan informasi dasar seperti visi, misi, dan dokumentasi kegiatan yang seringkali tidak diperbarui. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan secara tepat waktu dan akurat, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan terhadap sistem yang ada. Selain itu, implementasi e-government melalui sistem informasi desa di Desa Tanimulya juga belum memenuhi standar yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan. Undang-undang ini mengharuskan setiap desa untuk memiliki sistem informasi yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, apa yang dilakukan oleh Desa Tanimulya melalui WordPress belum mampu memenuhi fungsi tersebut secara efektif.

Fenomena yang terjadi di Desa Tanimulya ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam penerapan e-government di tingkat desa. Meskipun teknologi informasi sudah ada dan dapat diakses oleh masyarakat, pengelolaan yang kurang baik

menyebabkan potensi penuh dari sistem informasi desa tidak dapat diwujudkan. Penting bagi pemerintah desa untuk tidak hanya fokus pada penyediaan teknologi, tetapi juga pada pengelolaan dan pemeliharaan konten yang up-to-date serta relevan untuk masyarakat. Pada akhirnya, implementasi e-government di Desa Tanimulya melalui sistem informasi desa berbasis WordPress masih membutuhkan banyak perbaikan. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam sistem ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat diakses dengan mudah dan transparan. Dengan demikian, sistem informasi desa dapat benar-benar menjadi alat yang efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan metode deskriptif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut, karena peneliti menganalisis permasalahan yang bersifat sosial dan dinamis. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami permasalahan yang diangkat oleh peneliti terkait dengan Implementasi Sistem Informasi di Desa Tanimulya Kabupaten Bandung Barat. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) adalah Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alami. Peneliti menggunakan tipe peneliti deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memberikan pemahaman bagaimana Implementasi Sistem Informasi di Desa Tanimulya

Tanimulya Kabupaten Bandung Barat.

PEMBAHASAN

Desa Tanimulya terletak di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dengan luas 2,43 km² dan jumlah penduduk sebanyak 38.362 jiwa. Desa ini memiliki sejarah panjang sejak berdirinya sebagai Desa Ciledug pada tahun 1899 hingga berganti nama menjadi Desa Tanimulya pada tahun 1968. Perubahan nama ini mencerminkan transformasi desa dari masyarakat agraris menjadi desa yang berkembang pesat sebagai daerah industri. Desa Tanimulya saat ini memegang predikat sebagai Desa Swakarya, menandakan kemampuan desa dalam mandiri mengelola sumber daya dan potensinya. Namun, dalam implementasi Sistem Informasi Desa (SID), Desa Tanimulya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal teknologi dan transparansi informasi yang belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak di Desa Tanimulya, diketahui bahwa meskipun desa ini telah memiliki perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung SID, namun implementasinya belum berjalan sesuai harapan. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan akses jaringan internet, yang menyebabkan sulitnya masyarakat mengakses informasi secara online. Hal ini menjadi kendala serius mengingat pentingnya SID sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Pemerintah Desa Tanimulya mengakui bahwa sistem informasi yang ada saat ini, terutama yang berbasis WordPress, belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat dan up-to-date. Hal ini berdampak pada efektivitas pelayanan publik yang seharusnya bisa lebih transparan dan akuntabel.

Dalam konteks e-government, Desa Tanimulya telah mencoba menerapkan konsep ini melalui pengembangan SID

berbasis web. Namun, upaya ini belum sepenuhnya berhasil, terutama karena pengelolaan konten yang kurang baik dan tidak adanya pembaruan informasi yang rutin.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86, sistem informasi desa seharusnya menjadi pusat informasi yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Namun, kenyataan di Desa Tanimulya menunjukkan bahwa SID yang ada belum mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Misalnya, pada menu terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), informasi yang seharusnya tersedia tidak dapat diakses oleh masyarakat, yang menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan yang dihadapi Desa Tanimulya dalam implementasi SID mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam penerapan *e-government* di tingkat desa. Meskipun teknologi informasi sudah tersedia, pengelolaan yang kurang baik menyebabkan potensi penuh dari SID tidak dapat diwujudkan. Pemerintah desa perlu melakukan upaya serius untuk memperbaiki pengelolaan SID agar dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memudahkan akses terhadap informasi publik yang akurat dan transparan. Selain itu, wawancara dengan masyarakat dan perangkat desa menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan SID yang berbasis web. Sistem ini tidak hanya akan mempermudah akses informasi bagi masyarakat desa, tetapi juga akan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik dan pengelolaan data desa. Masyarakat mengharapkan adanya transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan desa dan program kerja pemerintah desa. Dengan adanya SID berbasis web, informasi seperti rencana pembangunan desa, peraturan desa, dan data kependudukan dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Implementasi e-government di Desa Tanimulya juga berpotensi untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Dengan sistem yang transparan dan dapat diakses oleh publik, proses pemerintahan dapat diawasi secara lebih efektif, sehingga meminimalisir peluang terjadinya korupsi. E-government juga memungkinkan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah desa, sehingga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Desa Tanimulya telah melakukan langkah awal dalam menerapkan SID sebagai bagian dari e-government, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Pemerintah desa perlu berinvestasi lebih banyak dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola SID dengan baik. Dengan demikian, SID dapat benar-benar berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik di Desa Tanimulya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam melakukan perbaikan dan pengembangan SID ke depannya, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.

KESIMPULAN

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya dilaksanakan di Desa Tanimulya, yang ditandai dengan tidak adanya website resmi desa yang menyediakan sistem informasi desa secara online, sehingga kebutuhan masyarakat akan akses informasi belum terpenuhi. Implementasi sistem informasi desa di Desa Tanimulya didasarkan pada gagasan masyarakat madani, di mana

partisipasi masyarakat diutamakan dalam memberikan informasi, meskipun pada kenyataannya belum semua unsur masyarakat madani, seperti egalitarianisme, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi, dan kemajemukan, terpenuhi dengan baik—hanya musyawarah yang berjalan efektif. Oleh karena itu, saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah agar Pemerintah Kabupaten Bandung segera mengembangkan peraturan tambahan yang mengatur sistem informasi desa untuk memfasilitasi komunikasi data yang lebih adil dan transparan antara pemerintah desa dan kabupaten. Selain itu, Pemerintah Desa Tanimulya diharapkan segera memulai implementasi sistem informasi desa berbasis internet, yaitu situs web desa, untuk meningkatkan pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan Pasal 86 UU Desa. Masyarakat Desa Tanimulya juga diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah desa dalam membangun sistem informasi desa yang efektif dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. 2003. Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta: Offset
- Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara
- Basuki Sulistyono. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Budiarti Dwi. 2009. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Mondial.
- Ghozali Imam dan Murdik Al. Mansur. 2002. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing di Bursa Efek Jakarta. Jakarta.
- Jogiyanto, H.M. 2009. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi
- Muhammad Yasin. 2015. Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Original.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta

Wibawa, Samodra. Dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

